

Pengelolaan Biaya Modal Kerja Pendidikan Di Mdt Sukma Illahi 3 Suku Canduang

Robi Alhanda, Hamdi Abdul Karim

¹²Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 15, 2025

Revised May 23, 2025

Accepted May 28, 2025

Available online June 08, 2025

Keywords

Working capital costs, financial management, education, planning, MDTA Sukma Illahi



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study aims to explore the strategy of working capital cost management in educational institutions using a literature study approach. The working capital cost of education includes funds needed to fund the daily operational activities of educational institutions, such as salaries of educators, procurement of teaching materials, and maintenance of facilities and infrastructure. This study identifies four important aspects in the management of working capital costs of education, namely planning, allocation, supervision, and sources of financing. The results of the study indicate that effective management of working capital costs can improve operational efficiency and the quality of educational services. This article provides important implications for leaders of educational institutions in making appropriate short-term financial decisions to support the continuity of educational activities. This study also reflects the real conditions at MDTA Sukma Illahi 3 Suku Canduang as an example of an educational institution facing similar challenges

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi pengelolaan biaya modal kerja dalam lembaga pendidikan dengan pendekatan studi pustaka.

Biaya modal kerja pendidikan mencakup dana yang dibutuhkan untuk mendanai kegiatan operasional harian lembaga pendidikan, seperti gaji tenaga pendidik, pengadaan bahan ajar, serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Studi ini mengidentifikasi empat aspek penting dalam pengelolaan biaya modal kerja pendidikan, yaitu perencanaan, pengalokasian, pengawasan, dan sumber pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan yang efektif terhadap biaya modal kerja dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan pendidikan. Artikel ini memberikan implikasi penting bagi pimpinan lembaga pendidikan dalam mengambil keputusan keuangan jangka pendek yang tepat guna mendukung kelangsungan kegiatan pendidikan. Studi ini juga merefleksikan kondisi riil di MDTA Sukma Illahi 3 Suku Canduang sebagai salah satu contoh lembaga pendidikan yang menghadapi tantangan serupa.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan suatu bangsa. Kualitas pendidikan yang baik akan melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengelolaan keuangan yang baik, terutama dalam aspek biaya modal kerja pendidikan. Biaya modal kerja dalam dunia pendidikan merujuk pada dana yang dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan operasional lembaga pendidikan dalam jangka pendek. Kebutuhan ini mencakup pembayaran gaji guru dan tenaga kependidikan, pembelian alat tulis dan bahan ajar, pemeliharaan fasilitas, hingga biaya listrik dan air yang diperlukan agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan optimal (Suryadi, 2018). Pendidik dan siswa adalah sumber daya manusia yang berharga di bidang pendidikan. Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif sangat penting di lembaga-lembaga tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan. Maka dari itu manajemen sumber daya manusia sangat penting sekali di kelola di sebuah lembaga pendidikan. (Zulfani, 2024)

Dalam praktiknya, pengelolaan biaya modal kerja pendidikan harus dilakukan secara efektif dan efisien. Penggunaan dana yang tidak terencana dengan baik dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam operasional pendidikan, seperti keterlambatan pembayaran gaji guru atau minimnya fasilitas pembelajaran yang memadai. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya kualitas pendidikan yang diberikan kepada peserta didik. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus memiliki strategi pengelolaan keuangan yang tepat agar dapat terus beroperasi tanpa hambatan finansial (Mulyadi, 2019).

Sumber pendanaan untuk modal kerja pendidikan berasal dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Pemerintah memiliki peran utama dalam pembiayaan pendidikan melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana ini sering kali disalurkan dalam bentuk program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi sekolah dasar dan menengah, serta dana hibah bagi perguruan tinggi negeri. Selain itu, masyarakat juga turut berkontribusi dalam pembiayaan pendidikan, terutama dalam bentuk Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang dibayarkan oleh orang tua siswa. Bagi lembaga pendidikan swasta, SPP sering kali menjadi sumber utama pembiayaan operasional mereka (Saragih, 2020).

Tidak hanya dari pemerintah dan masyarakat, dunia usaha juga memiliki peran dalam mendukung pembiayaan pendidikan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Banyak perusahaan yang menyalurkan dana CSR ke sektor pendidikan, baik dalam bentuk beasiswa bagi siswa kurang mampu, pengadaan fasilitas pendidikan, hingga pelatihan bagi tenaga pendidik. Selain itu, lembaga pendidikan yang bernaung di bawah yayasan sering kali mendapatkan dana hibah atau donasi dari berbagai pihak yang peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan (Mulyadi, 2019).

Namun, meskipun memiliki berbagai sumber pendanaan, pengelolaan biaya modal kerja pendidikan tetap menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketergantungan pada satu sumber pendanaan, seperti hanya mengandalkan dana BOS atau SPP. Ketika terjadi keterlambatan pencairan dana BOS atau berkurangnya jumlah siswa yang membayar SPP, maka keuangan sekolah dapat terganggu dan menghambat operasionalnya. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana juga menjadi isu penting. Tanpa adanya sistem pengelolaan keuangan yang transparan, dana pendidikan berisiko disalahgunakan dan tidak digunakan sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan (Suryadi, 2018).

Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi juga berpengaruh terhadap pengelolaan biaya modal kerja pendidikan. Dalam situasi krisis ekonomi, banyak orang tua siswa yang mengalami kesulitan dalam membayar SPP, sehingga lembaga pendidikan harus mencari alternatif sumber pendanaan agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Oleh karena itu, diversifikasi sumber pendanaan menjadi strategi yang sangat penting untuk menjaga stabilitas finansial lembaga pendidikan.

Dengan demikian, pengelolaan biaya modal kerja pendidikan harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan strategi yang tepat. Lembaga pendidikan perlu mengelola anggaran secara efisien, mencari sumber pendanaan yang beragam, serta memastikan transparansi dalam penggunaan dana. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus bekerja sama dalam menciptakan sistem pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan agar kualitas pendidikan dapat terus meningkat. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan dunia pendidikan dapat memberikan layanan yang optimal dan mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan mengkaji berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen kebijakan yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali pemikiran para ahli serta praktik-praktik terbaik yang telah diterapkan di berbagai lembaga pendidikan terkait pengelolaan biaya modal kerja.

Kriteria literatur yang digunakan meliputi:

- a) Diterbitkan dalam 10 tahun terakhir.
- b) Relevan dengan tema pengelolaan keuangan pendidikan.
- c) Memuat informasi teoritis maupun praktis mengenai modal kerja dalam pendidikan.

Selain itu, penulis juga mengamati praktik manajemen keuangan yang berlangsung di MDTA Sukma Illahi 3 Suku Canduang, sebagai bagian dari refleksi kontekstual atas penerapan konsep-konsep tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pengelolaan Biaya Modal Kerja Pendidikan

Biaya modal kerja pendidikan adalah semua dana yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari guna memastikan proses pembelajaran berjalan lancar. Biaya ini mencakup pengeluaran rutin seperti pembayaran gaji guru dan staf administrasi, biaya listrik dan air, pembelian bahan ajar, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan (Saragih, 2020).

Menurut Suryadi (2018), biaya modal kerja dalam pendidikan dapat didefinisikan sebagai dana yang digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional sekolah atau perguruan tinggi yang bersifat rutin dan harus tersedia secara kontinu agar aktivitas pendidikan dapat berlangsung tanpa hambatan. Dalam konteks ini, biaya modal kerja memiliki peran penting dalam menjamin keberlangsungan kegiatan akademik dan administrasi.

Masalah modal dalam perusahaan merupakan persoalan yang tidak akan pernah berakhir, mengingat masalah modal mengandung begitu banyak aspek. Untuk mengetahui pengertian modal dalam keputusan pendanaan dapat dipahami melalui definisi-definisi modal yang dikemukakan oleh para ahli keuangan berikut Riyanto, mengartikan modal sebagai “keloktfitas” dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debit, sedangkan yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang-barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dan fungsi produktifnya untuk membentuk pendapatan.(Junaidi,2019)

Sementara itu, Mulyadi (2019) menjelaskan bahwa biaya modal kerja pendidikan tidak hanya mencakup pengeluaran harian, tetapi juga mencakup cadangan dana yang harus disiapkan untuk menghadapi kemungkinan ketidakstabilan keuangan, seperti keterlambatan pencairan dana dari pemerintah atau berkurangnya jumlah siswa yang membayar SPP. Dengan demikian, pengelolaan biaya modal kerja pendidikan harus dilakukan secara strategis agar lembaga pendidikan tidak mengalami kesulitan keuangan.

Pengelolaan Biaya Modal Kerja Pendidikan

Pengelolaan biaya modal kerja pendidikan adalah proses perencanaan, pengalokasian, pengendalian, dan evaluasi penggunaan dana operasional lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan operasional dapat terpenuhi secara efisien. Menurut Saragih (2020), ada beberapa prinsip utama dalam pengelolaan biaya modal kerja pendidikan, yaitu :

Perencanaan yang Matang

Perencanaan yang baik akan membantu lembaga pendidikan dalam menentukan kebutuhan anggaran serta memprioritaskan pengeluaran yang paling penting. Misalnya, sekolah harus memastikan bahwa gaji guru dan staf dibayarkan tepat waktu sebelum mengalokasikan dana untuk renovasi gedung (Mulyadi, 2019).

Alokasi Dana yang Efektif

Pengelolaan biaya modal kerja harus dilakukan dengan prinsip efektivitas, yaitu memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi kelangsungan pendidikan. Misalnya, pengadaan alat tulis dan bahan ajar harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan tenaga pendidik (Suryadi, 2018).

Pengendalian dan Pengawasan Anggaran

Pengawasan dalam penggunaan biaya modal kerja sangat penting untuk menghindari pemborosan atau penyalahgunaan dana. Pihak sekolah atau universitas harus memiliki sistem audit dan laporan keuangan yang transparan agar dana yang ada dapat digunakan sesuai dengan rencana (Saragih, 2020).

Diversifikasi Sumber Pendanaan

Lembaga pendidikan tidak boleh hanya bergantung pada satu sumber pendanaan, seperti dana BOS atau SPP. Mereka harus mencari alternatif lain, seperti dana hibah, kerja sama dengan pihak swasta, atau program beasiswa untuk menutupi kekurangan anggaran (Mulyadi, 2019).

Sumber-Sumber Biaya Modal Kerja Pendidikan

Biaya modal kerja pendidikan dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain: Anggaran Pemerintah (APBN dan APBD)

Pemerintah menyediakan dana pendidikan melalui APBN dan APBD yang digunakan untuk mendukung operasional sekolah negeri serta memberikan bantuan kepada sekolah swasta. Salah satu contoh program pemerintah adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional sekolah dasar dan menengah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021).

Sumbangan Orang Tua Siswa (SPP dan Iuran Sekolah)

Sekolah swasta dan perguruan tinggi mendapatkan pemasukan utama dari biaya pendidikan yang dibayarkan oleh orang tua siswa. Dana ini digunakan untuk membayar gaji tenaga pendidik, pemeliharaan sarana, serta pengembangan program akademik (Saragih, 2020).

Pendanaan dari Swasta (CSR dan Hibah)

Banyak perusahaan yang memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bidang pendidikan, seperti pemberian beasiswa, bantuan infrastruktur, dan pelatihan bagi guru. Lembaga pendidikan juga bisa mendapatkan hibah dari yayasan sosial atau lembaga filantropi (Mulyadi, 2019).

Pendapatan dari Kegiatan Ekstrakurikuler atau Usaha Sekolah

Beberapa sekolah atau universitas menjalankan usaha mandiri, seperti koperasi sekolah atau program pelatihan berbayar, yang hasilnya digunakan untuk mendukung operasional pendidikan (Suryadi, 2018).

Pengelolaan biaya modal kerja pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam keberlangsungan sistem pendidikan. Biaya ini mencakup pengeluaran rutin yang harus dipenuhi agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik mencakup perencanaan yang matang, alokasi dana yang efektif, pengendalian anggaran yang ketat, serta diversifikasi

sumber pendanaan. Dengan strategi yang tepat, lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

Analisis ruang lingkup Pengelolaan Biaya Modal Kerja Pendidikan.

Pengelolaan biaya modal kerja pendidikan mencakup berbagai aspek penting yang harus diperhatikan oleh lembaga pendidikan. Secara umum, ruang lingkup ini dapat dikategorikan menjadi tiga bagian utama: pengelolaan sumber pendanaan, pengalokasian anggaran, dan pengawasan keuangan (Saragih, 2020).

Pengelolaan Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan biaya modal kerja pendidikan berasal dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Lembaga pendidikan harus dapat mengidentifikasi dan mengelola sumber pendanaan ini dengan baik agar dapat memenuhi kebutuhan operasionalnya. Sumber-sumber utama pendanaan meliputi:

Anggaran Pemerintah (APBN dan APBD)

Pemerintah mengalokasikan dana pendidikan melalui APBN dan APBD untuk mendukung keberlangsungan pendidikan nasional. Dana ini disalurkan dalam bentuk program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan dasar dan menengah, serta dana hibah bagi perguruan tinggi negeri (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021).

Kontribusi Masyarakat (SPP dan Donasi)

Sekolah swasta dan perguruan tinggi mengandalkan biaya pendidikan yang dibayarkan oleh orang tua siswa dalam bentuk SPP atau iuran pendidikan lainnya. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan donasi dalam bentuk sumbangan pembangunan atau bantuan fasilitas sekolah (Saragih, 2020).

Dukungan dari Sektor Swasta (CSR dan Hibah)

Banyak perusahaan memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) yang mendukung dunia pendidikan melalui beasiswa, pengadaan fasilitas, dan pelatihan tenaga pendidik. Selain itu, beberapa lembaga pendidikan juga mendapatkan hibah dari yayasan sosial atau organisasi filantropi (Mulyadi, 2019).

Pendapatan dari Kegiatan Ekstrakurikuler dan Usaha Sekolah

Beberapa sekolah dan universitas menjalankan unit bisnis seperti koperasi sekolah, program pelatihan berbayar, atau penyewaan fasilitas sebagai sumber tambahan pendapatan (Suryadi, 2018).

Pengalokasian Anggaran

Setelah dana terkumpul, lembaga pendidikan harus mengalokasikan anggaran secara efektif sesuai dengan kebutuhan prioritas. Beberapa aspek utama dalam pengalokasian anggaran adalah:

Gaji dan Honorarium Tenaga Pendidik

Komponen terbesar dalam biaya modal kerja pendidikan adalah pembayaran gaji guru, tenaga kependidikan, serta honorarium bagi tenaga pengajar tidak tetap. Keterlambatan pembayaran gaji dapat berdampak negatif pada kinerja tenaga pendidik (Saragih, 2020).

Pembelian Sarana dan Prasarana Pendidikan

Anggaran ini digunakan untuk membeli alat tulis, buku ajar, komputer, serta peralatan laboratorium guna mendukung proses pembelajaran yang efektif (Mulyadi, 2019).

Biaya Operasional Harian

Termasuk biaya listrik, air, internet, pemeliharaan gedung, serta kebutuhan logistik lainnya yang mendukung keberlangsungan kegiatan belajar mengajar (Suryadi, 2018).

Cadangan Dana Darurat

Lembaga pendidikan harus menyisihkan sebagian anggarannya sebagai dana cadangan untuk menghadapi situasi darurat seperti keterlambatan pencairan dana BOS atau krisis ekonomi yang berdampak pada keuangan sekolah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021).

Pengawasan dan Pengendalian Keuangan

Pengawasan dalam pengelolaan biaya modal kerja bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang ada digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Beberapa metode yang dapat diterapkan dalam pengawasan keuangan adalah:

Audit Keuangan Berkala

Pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor internal maupun eksternal bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana (Saragih, 2020).

Sistem Pelaporan Keuangan yang Transparan

Lembaga pendidikan harus memiliki sistem pencatatan keuangan yang jelas dan terdokumentasi dengan baik agar dapat dipantau oleh pihak yang berkepentingan (Mulyadi, 2019).

Evaluasi Kinerja Keuangan

Setiap tahun, lembaga pendidikan perlu mengevaluasi efektivitas pengelolaan anggaran dan mencari solusi jika terjadi ketidakseimbangan finansial (Suryadi, 2018)

Tantangan dalam Pengelolaan Biaya Modal Kerja Pendidikan

Meskipun memiliki berbagai sumber pendanaan dan mekanisme pengelolaan yang baik, pengelolaan biaya modal kerja pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

Ketergantungan pada Satu Sumber Dana

Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, hanya bergantung pada dana BOS tanpa memiliki sumber pendanaan alternatif. Hal ini dapat menjadi masalah jika pencairan dana mengalami keterlambatan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021).

Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas

Beberapa lembaga pendidikan masih menghadapi isu penyalahgunaan dana akibat kurangnya sistem pengawasan yang ketat (Saragih, 2020).

Dampak Kondisi Ekonomi

Krisis ekonomi dapat menyebabkan penurunan jumlah siswa yang mampu membayar SPP, sehingga lembaga pendidikan harus mencari cara lain untuk menutupi defisit anggaran (Mulyadi, 2019).

Pengertian Biaya Modal Kerja Pendidikan

Biaya modal kerja pendidikan merupakan dana yang digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional jangka pendek lembaga pendidikan. Dalam praktiknya, terutama di lembaga kecil seperti MDTA Sukma Illahi 3 Suku Canduang, kebutuhan ini mencakup pengadaan alat tulis, insentif guru, serta biaya utilitas harian seperti listrik dan air.

Perencanaan Biaya Modal Kerja

Perencanaan menjadi tahap awal yang krusial. Di MDTA Sukma Illahi 3 Suku Canduang, perencanaan dilakukan secara sederhana namun fungsional, dengan melibatkan kepala madrasah, bendahara, dan pengurus yayasan. Tantangan utamanya adalah memastikan perencanaan sesuai dengan jumlah murid yang relatif sedikit (20 orang), sehingga setiap alokasi dana harus diperhitungkan secara cermat untuk menghindari defisit.

Pengalokasian Biaya Modal Kerja

Pengalokasian di lembaga seperti MDTA Sukma Illahi dilakukan berdasarkan skala prioritas, misalnya mendahulukan pembayaran insentif guru dibandingkan pembelian alat tambahan. Dengan keterbatasan dana, pengelola harus mampu berinovasi dalam memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal.

Pengawasan Penggunaan Biaya Modal Kerja

Meski merupakan lembaga pendidikan skala kecil, pengawasan keuangan di MDTA Sukma Illahi tetap dilaksanakan, terutama oleh pihak yayasan dan orang tua siswa. Laporan keuangan sederhana disusun setiap bulan dan dibahas dalam forum musyawarah. Hal ini membantu menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

Sumber Pembiayaan Biaya Modal Kerja

MDTA Sukma Illahi 3 Suku Canduang tidak menerima dana BOS seperti sekolah formal, sehingga mengandalkan sumber pembiayaan dari:

1. Sumbangan bulanan orang tua murid.
2. Bantuan dari donatur lokal.
3. Program wakaf dan infak mingguan.
4. Kerjasama dengan masyarakat setempat melalui kegiatan sosial.

Model pembiayaan ini menuntut partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dan mengajarkan pentingnya kemandirian lembaga pendidikan.

SIMPULAN

Pengelolaan biaya modal kerja pendidikan merupakan aspek penting dalam mendukung keberlanjutan operasional lembaga pendidikan. Studi pustaka ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan modal kerja sangat bergantung pada perencanaan, pengalokasian, pengawasan, dan diversifikasi sumber pendanaan.

Kondisi di MDTA Sukma Illahi 3 Suku Canduang memperlihatkan bahwa meskipun berada dalam keterbatasan, dengan manajemen sederhana namun transparan, lembaga tetap mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Studi ini memberikan pelajaran bahwa prinsip-prinsip manajemen keuangan dapat diterapkan di semua level pendidikan, baik besar maupun kecil, formal maupun non-formal.

Pengelolaan biaya modal kerja pendidikan merupakan aspek krusial dalam menjamin keberlangsungan dan efektivitas operasional lembaga pendidikan. Biaya modal kerja mencakup pengeluaran rutin seperti gaji tenaga pendidik, biaya operasional harian, serta perawatan sarana dan

prasarana. Tanpa pengelolaan yang baik, lembaga pendidikan dapat mengalami ketidakseimbangan keuangan yang berdampak pada kualitas pembelajaran (Suryadi, 2018).

Ruang lingkup pengelolaan biaya modal kerja pendidikan terdiri dari tiga aspek utama, yaitu pengelolaan sumber pendanaan, pengalokasian anggaran, dan pengawasan keuangan. Sumber pendanaan dapat berasal dari APBN dan APBD, kontribusi masyarakat, dukungan dari sektor swasta, serta pendapatan dari kegiatan ekstrakurikuler dan usaha sekolah. Setelah dana terkumpul, pengalokasian anggaran harus dilakukan secara efektif untuk memastikan pemenuhan kebutuhan utama seperti gaji tenaga pendidik, pembelian sarana pendidikan, biaya operasional, serta cadangan dana darurat (Mulyadi, 2019).

Selain itu, pengawasan dan pengendalian keuangan sangat diperlukan guna memastikan transparansi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Beberapa strategi yang dapat diterapkan meliputi audit keuangan berkala, sistem pelaporan yang jelas, serta evaluasi kinerja keuangan secara rutin (Saragih, 2020). Dengan adanya pengawasan yang baik, potensi penyalahgunaan dana atau pemborosan anggaran dapat diminimalisir.

Namun demikian, pengelolaan biaya modal kerja pendidikan masih menghadapi beberapa tantangan, di antaranya ketergantungan pada satu sumber dana, kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta dampak kondisi ekonomi yang mempengaruhi kemampuan lembaga pendidikan dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021). Oleh karena itu, diperlukan strategi diversifikasi pendanaan dan sistem manajemen keuangan yang lebih ketat agar lembaga pendidikan dapat beroperasi secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pengelolaan biaya modal kerja pendidikan yang efektif dan efisien sangat penting dalam mendukung mutu pendidikan. Dengan perencanaan yang matang, pengalokasian anggaran yang optimal, serta sistem pengawasan yang baik, lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara tepat guna, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan (Suryadi, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

- Junaidi, (2019) Analisis Efisiensi Modal Kerja Pada Perusahaan Teralis Di Cv.Tuai Padi Tanjungpinang, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (Stie) Pembangunan Tanjungpinang
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). Laporan Keuangan dan Anggaran Pendidikan Tahun 2021. Jakarta: Kemendikbud
- Mulyadi, D. (2019). Manajemen Keuangan Pendidikan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Saragih, R. (2020). Strategi Pengelolaan Dana Pendidikan yang Efektif. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, A. (2018). Pembiayaan Pendidikan di Indonesia: Konsep dan Aplikasinya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zulfani ,S (2024) Urgensi Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan., An-Nahdlah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 4, Nomor 1